



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TAHUN 2026

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, terdapat kebutuhan untuk menyusun kebijakan yang merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk mengakomodasi proses pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menyusun Program Pembentukan Peraturan Bupati Banyumas Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Banyumas Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Banyumas Tahun 2026 dengan daftar rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **31 DEC 2025**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2026

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN BUPATI

No.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)
1	Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi	Bapenda
2	Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah	Bapenda
3	Klasifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Bapenda
4	Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	Bapenda
5	Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah	Bapenda
6	Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal	Bapenda
7	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Bapenda
8	Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Bapenda
9	Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda
10	Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran	Bapenda
11	Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan	Bapenda
12	Perubahan atas Perbup Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Bapenda
13	Perubahan atas Perbup Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Bapenda
14	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BKAD
15	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BKAD
16	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga	BKAD
17	Perjalanan Dinas	BKAD
18	Penjabaran Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BKAD
19	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 beserta perubahannya	BKAD

No.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)
20	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 beserta perubahannya	BKAD
21	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	BKAD
22	Analisis Standar Belanja Tahun 2027	BKAD
23	Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD	BKAD
24	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Bakesbangpol
25	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana dan Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas	Dinkop UKM Perdagangan
26	Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Dinkop UKM Perdagangan
27	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinkes KB
28	Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah pada Sektor Kesehatan	Dinkes KB
29	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tahun 2024-2029	Dinkes KB
30	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari APBD	Dinkes KB
31	Kesehatan Reproduksi	Dinkes KB
32	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Dinperkim
33	Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas	Dinpermades
34	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Aliran Sungai Semanger Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029	Dinpermades
35	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027	Dinpermades
36	Standar Harga Satuan Desa	Dinpermades
37	Disiplin Aparatur Pemerintah Desa	Dinpermades
38	Pembentukan Desa Persiapan Watuagung Kulon Kecamatan Tambak	Dinpermades
39	Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Dinpermades
40	Pengelolaan Aset Desa	Dinpermades
41	Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas	Dinpermades
42	Standar Pelayanan Minimal Desa	Dinpermades
43	Perubahan Kedua atas Pedoman Pemilihan Kepala Desa	Dinpermades

No.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)
44	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa	Dinpermades
45	Laporan Kepala Desa	Dinpermades
46	Tata Kelola Integrasi Data Sosial dan Pemberdayaan Desa Melalui Sistem Infomasi Desa Satu Data Satu Aksi (SID SADASA)	Dinpermades
47	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan DAS Semanger Kec. Somagede	Dinpermades
48	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan DAS Serayu	Dinpermades
49	Pedoman Penyusunan APBDes	Dinpermades
50	78 rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas 78 Desa	Dinpermades
51	Pembentukan Desa Persiapan Watu Agung Kulon Kec. Tambak Kab. Banyumas	Dinpermades
52	Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan	Bagian Organisasi
53	Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	Bagian Organisasi
54	OTK UPTD Dinas Pertanian	Bagian Organisasi
55	OTK UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bagian Organisasi
56	OTK UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Bagian Organisasi
57	OTK UPTD Dinkes Keluarga Berencana	Bagian Organisasi
58	OTK UPTD Dinkop UKM dan Perdagangan	Bagian Organisasi
59	OTK UPTD Dinsos PPPA	Bagian Organisasi
60	OTK UPTD Dinas Pekerjaan Umum	Bagian Organisasi
61	OTK Sekretariat DPRD	Bagian Organisasi
62	OTK UPTD Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Organisasi
63	OTK Dinkominfo	Bagian Organisasi
64	Pencabutan Perbup Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas	Bagian Organisasi
65	Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Satpol PP
66	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame	DPMPTSP
67	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ PID) Tahun 2025-2029	Bapperida
68	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026	Bapperida
69	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2026	Bapperida
70	Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2026	Bapperida
71	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Dinkominfo
72	Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria	Bagian Perekonomian
73	Peninjauan Tarif Retribusi	Dinakerperin

No.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)
74	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Dinas Pertanian
75	Peraturan Pelaksanaan Perda Pesantren	Bagian Kesra
76	Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas KP dan Perikanan/ Dinas Pertanian
77	Pola Tata Kelola UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas pada Dinporabudpar	Dinporabudpar
78	Pengadaan Barang/Jasa UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas pada Dinporabudpar	Dinporabudpar
79	Standar Pelayanan Minimal UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas pada Dinporabudpar	Dinporabudpar
80	Rencana Strategi UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas pada Dinporabudpar	Dinporabudpar
81	Penyelenggaraan Angkutan Umum Masal Dengan Skema Pembelian Layanan (<i>Buy the Service</i>)	Dinhub
82	Perubahan atas Perbup Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Tindak Pidana Korupsi	Inspektorat Daerah
83	Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dinkominfo
84	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satu Data	Dinkominfo

